

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Gorontalo tetapi dengan nilai koefisien determinasi 19,6%.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Sebaiknya pihak instansi mengupayakan transparansi dalam pengelolaan yang lebih optimal termasuk dalam perencanaan atau anggaran yang jelas penentuannya serta pelaksanaan dan capaian yang terealisasi.

Daftar Pustaka

- Adiwirya, Muhammad Firdiansyah DKK. 2015. *Akuntabilitas , Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. e-journal*. Universitas Udayana, Bali, Indonesia.
- Al-Rasyid, Harun. 2003. *Statistika Sosial. Bandung : Program Pascasarjana*.
- Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan*.(Online). (diakses 20 juni 2017) tersedia di World Wide Web:<http://ovy19.wordpress.com>.
- Anwar dan Ota. 2015. *Statistika Pendidikan Teori dan Aplikasi*. Sultan Amai Press: Gorontalo.
- Asrida. 2012. *Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen*. *Jurnal Kebangsaan*, Vol.1 No.1 ISSN: 2089-5917
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, Universitas Gajah. Mada.
- Darise. Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan daerah*. Edisi kedua, Penerbit PT. Indeks.
- Deddi Nordiawan 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Ferdiana, Meity dan ansar, Muhammad. 2012. *Akuntabilitas LSM, Milik Donor atau Publik (Studi Analisis wacana pada kantor eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah)*.
- Firmansyah. 2015. *Peran Sistem Akuntansi keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. e-journal. Universitas Widyatama*
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP- Semarang: Universitas Dipenigoro
- Halim. Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik AkuntansiKeuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan. Malayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi. Aksara.
- Hehanussa, Salomi J. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi. Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. 2nd. Conference in Business, Accounting and Management. Vol. 2 No 1
- Iqsan. 2016. "Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur". *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 2016. 4(1): 230-240 ISSN 2477-2631
- Kusuma. Marhaendra. 2012. "Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Cahaya Aktiva Vol.02 No.02, september 2012*.

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM, YKPN.
- Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi offset. Yogyakarta.
- Martha. Widya. 2014. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Di Koat Bandung (Survey di Instansi Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi* Program studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Manaroisong. Johny. 2014. *Pengaruh Sistem Informasi keuangan, Partisipasi Anggaran, Serta Sikap Perilaku Aparat Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara*. e-journal. Universitas Negeri Manado
- Pasaribu. FJ. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKOD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. *Tesis*. Medan. Program Pasca Sarjana Univ. Sumatera Utara.
- Rahmanurrasjid. Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerinta Yang Baik di Daerah. *Tesis* Tidak Dipublikasikan. Semarang. Program Megister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah*.
- . Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*
- . Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *pemerintah daerah*
- . Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *perimbangan daerah*
- . Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang *perimbangan keuangan pusat dan daerah*.
- Santoso. 2009. *Metode Penelitian dan tesis bisnis*. Penerbit PT Indeks
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Seddon P, Graeser, V., dan Wilcocks, L. P. (2002). "Measuring Organizational ISEffectiveness: an Overview and Update of Sentor Management Perspectives. *The Database For Advances in Information Systems*", Vol. 33, No. 2, pp.11-28
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama
- Sumarsono. 2003. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

- . 2015. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cetakan Ke 3, Bandung, Alfabeta
- Suriadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung. PT Rafika Aditama.
- Stevani. Agustin. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Transparansi Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. e-journal. Universitas Negeri Gorontalo*
- Tumarni. 2015. Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Penggunaan Nyata Terhadap Kepuasan Pemakai Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Provinsi Jambi. *e-journal. Universitas Jambi*.
- Werimon, Simson, Imam Ghazali & M. Nasir. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makasar. Hal. 21-23.